

**PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

(Study di Desa Datar Kecamatan Muara Dua Kabupaten OKU Selatan)

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh:**

**BELLA ARISKA**

**NPM. 1621020196**

**Jurusan: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H/2020 M**

**PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PENGOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP  
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

(Study di Desa Datar Kecamatan Muara Dua Kabupaten OKU Selatan)

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh:

**BELLA ARISKA  
NPM. 1621020196**

**Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**

**Pembimbing I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag  
Pembimbing II : Drs. H. Irwantoni, M.Hum**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H/2020 M**

## ABSTRAK

Dalam konteks *fiqh siyasah dusturiyah* bahwa kegiatan dalam rangka membuka lahan perkebunan, hal itu merupakan realisasi kemaslahatan manusia demi menunjang kebutuhannya hidup didunia yang mendatangkan kemaslahatan serta menajuhkan manusia dari kemudharatan. Pembukaan lahan merupakan suatu rangkaian kegiatan merubah fungsi lahan dalam bentuk alami menjadi lahan yang perkebunan yang awal mulanya lahan yaitu berupa hutan. Berkaitan dengan hal itu, Desa Datar adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, secara geografis desa tersebut merupakan desa yang dikelilingi lahan-lahan yang luas, maka dari itu masyarakat memanfaatkan alam sekitar dengan membuka lahan perkebunan. Namun jika dalam kegiatan tersebut dilakukan dengan benar/tidak berdasarkan ketentuan UU. No. 32 Tahun 2009 Tentang PPLH, maka hal itu dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, sebagaimana yang terjadi di Desa Datar Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan.

Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini yaitu bagaimana pembukaan lahan perkebunan di Desa Datar Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH. Dan bagaimana perspektif *fiqh siyasah* terhadap pembukaan lahan perkebunan di Desa Datar Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan.

Adapun tujuan yang dapat ambil dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pembukaan Lahan Perkebunan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup di Desa Datar, dan untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap pembukaan lahan perkebunan di Desa Datar Kecamatan Muara Dua Kabupaten OKU Selatan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field reasearch*) dengan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan sumber data primer (diperoleh langsung dari lapangan) dan data sekunder (buku, jurnal dsb.) dan metode pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisa data dilakukan dengan kualitatif dengan metode berfikir Induktif.

Penemuan dari penelitian ini adalah: 1. Pembukaan lahan perkebunan di Desa Datar Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, bahwa mayoritas dilakukan dengan cara dibakar dengan luas melebihi 2 Ha dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Sedangkan dalam ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH, Pasal 69 ayat 1 huruf h menyatakan bahwa hanya membolehkan pembukaan lahan dengan cara dibakar dengan luas 2 Ha per KK dengan membuat sekat api. Terhadap sanksi yang dapat dikenakan atas pembukaan lahan perkebunan terkandung dalam Pasal 108 UU Tentang PPLH. 2. Dalam konteks *fiqh siyasah dusturiyah* bahwa kegiatan membuka lahan perkebunan sebagaimana yang terjadi di Desa Datar merupakan realisasi kemaslahatan demi menunjang kebutuhannya hidup didunia dan menjauhkan manusia dari kemudharatan, maka hal tersebut sejalan dengan tujuan *maqasid al-syari'ah* yaitu melindungi jiwa (*hifdz al-nafs*). Namun dalam *fiqh siyasah dusturiyah* tidak membenarkan segala perbuatan yang menimbulkan kemudharatan baik terhadap alam itu sendiri, manusia dan generasi yang akan datang. Hal ini juga dijelaskan sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-A'raf ayat 56.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN  
INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721) 703260*

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bella Ariska  
NPM : 1621020196  
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iiyyah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: Pembukaan Lahan Perkebunan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh Siyasah. (Study di Desa Datar Kecamatan Muara Dua Kabupaten OKU Selatan). Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 7 Juli 2020

Penulis,



NMP. 1621020196





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Pembukaan Lahan Perkebunan Menurut  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  
Hidup Perspektif Fiqh Siyasah. (Study di Desa  
Datar Kecamatan Muara Dua Kabupaten OKU  
Selatan)**

**Nama : Bella Ariska  
NPM : 1621020196  
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iiyyah)  
Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqosah Fakultas Syari'ah Universitas Islam  
Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag  
NIP. 195707051989031001**

**Drs. H. Irwantoni, M.Hum  
NIP. 196010211991031002**

**Mengetahui  
Ketua Jurusan Siyasah**

**Frenki, M.S.I  
NIP. 198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul : Pembukaan Lahan Perkebunan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh Siyasa. (Study di Desa Datar Kecamatan Muara Dua Kabupaten OKU Selatan), disusun oleh: Bella Ariska, NPM: 1621020196, Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyyah), telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. pada Hari/Tanggal: Kamis 17 September 2020**

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Dr. Jayusman, M.Ag**

**Sekretaris : Dr. Agus Hermanto, M.H.I**

**Penguji I : Eti Karini, S.H., M.Hum**

**Penguji II : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag**

**Penguji III : Drs. H. Irwantoni, M.Hum**



**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. H. Khairuddin, M.H.  
NIP. 196210211993031002**



## MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ  
قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.* (Q.S Al-A'raf ayat 56).



## PERSEMBAHAN

*Allhamdullilah Hirhabbil 'Alamin* dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang. Setelah sekian banyak proses yang panjang akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Untuk melewati proses ini tidaklah mudah tanpa adanya dukungan serta do'a dari orang-orang yang sangat penulis sayangi. Skripsi ini kupersembahkan sebagai bentuk dari ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang sangat mendalam kepada:

1. Kedua orang tuaku Ayahanda Mediusman dan Ibunda Emi yang telah ikhlas mendidiku. Ucapan terima kasih atas kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang begitu besar dan mulia. Berkat cucuran keringat serta do'a tulusmu hingganya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini sampai bisa mendapatkan gelar S1 di UIN Raden Intan Lampung.
2. Saudara tercinta Yayan Andriawan, Vikri Andrianto, Windi Andreansyah dan Ramon yang telah memberikan dukungan, semangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikanku di UIN Raden Intan Lampung.
3. Sanak familiku yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
4. Seluruh dosen UIN Raden Intan Lampung dan khususnya kepada dosen Fakultas Syari'ah yang selalu ilmunya kepada penulis dengan ikhlas.
5. Yang kubanggakan almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing penulis dalam berfikir dan bertindak.



## RIWAYAT HIDUP

**Bella Ariska** dilahirkan di Desa Kp. Sawah Kec. Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tanggal 6 Januari 1999, anak kelima dari lima bersaudara oleh pasangan Bapak Mediusman dan Ibu Emi.

Pendidikan formal penulis, dimulai sejak pendidikan Taman Kanak-Kanak Muara Dua. Kemudian penulis melanjutkan Sekolah Dasar di SDN 13 Muaradua pada tahun 2004 dan lulus pada tahun 2010. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Muaradua dan selesai pada tahun 2013. Selama di SMPN 1 Muaradua penulis mengikuti ekstrakurikuler Paskibra, Pramuka, OSIS. Setelah itu penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Muaradua pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016. Selama di SMAN 1 Muaradua penulis mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Paskibra, Pramuka, OSIS.

Kemudian setelah itu pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan prodi Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara Islam) di Fakultas Syari'ah. Selama menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi penulis tergabung dalam organisasi mahasiswa.

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah* segala puji syukur bagi Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, taufik dan hidayah serta petunjuk dan limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: Pembukaan Lahan Perkebunan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh Siyasah. (Study di Desa Datar Kecamatan Muara Dua Kabupaten OKU Selatan). Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan junjungan Nabi Muhammad SAW, dan semoga kelak kita mendapatkan syafa'at-Nya di hari kiamat. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Skripsi ini sngat banyak mendapat bantuan semua pihak. Dalam proses penyelesaiannya, tidak lupa penulis haturkan terimakasih sedalam dalamnya, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

2. Dr. H. Khairuddin, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Frenki, M.S.I selaku Ketua Jurusan Siyasah (Hukum Tata negara) yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta selalu memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Drs. H. Irwantoni, M.Hum selaku Pembimbing II yang juga banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang juga banyak memberikan ilmu, bimbingan, dan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
7. Bpk. Sarifuddin Bakri selaku Kepala Desa beserta jajaran Pemerintah Desa Datar yang telah membantu penulis dalam penelitian skripsi ini.
8. Ayahanda Mediusman dan Ibunda Emi tercinta yang telah banyak memberikan dukungan moril dan materil yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
9. Sahabat-sahabat Siyasah D angkatan 2016, yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan pahala disisi Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak demi kemaslahatan bersama dan bernilai ibadah dihadapan Allah SWT. *Amiin Yarabbal 'Alamiin*

Bandar Lampung, 7 Juli 2020

Penulis,





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	4
C. Latar Belakang Masalah .....	5
D. Fokus Penelitian .....	10
E. Rumusan Masalah .....	10
F. Tujuan Penelitian .....	11
G. Signifikasi Penelitian .....	11
H. Metode Penelitian .....	12

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Hukum Islam Tentang Siyasah Dusturiyah .....	17
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah .....	17
2. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah .....	22
3. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah .....	25
4. Pembukaan Lahan Perkebunan Menurut Siyasah Dusturiyah .....	30
B. Pembukaan Lahan Perkebunan .....	37
1. Pengertian Perkebunan .....	37
2. Pengertian Pembukaan Lahan Perkebunan .....	40
3. Konsep Pembukaan Lahan Perkebunan Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	43
C. Tinjauan Pustaka .....	48

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Datar .....	51
B. Kondisi Geografis Desa Datar .....	53
C. Visi Dan Misi Desa Datar .....	54
D. Kondisi Penduduk Desa Datar .....	56
E. Mata Pencarian Penduduk Desa Datar .....	58
F. Pembukaan Lahan Perkebunan di Desa Datar Kecamatan Muara Dua Kabupaten OKU Selatan .....	59

#### **BAB IV ANALISIS**

- A. Pembukaan Lahan Perkebunan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Datar ..... 65
- B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Pembukaan Lahan Perkebunan di Desa Datar..... 70

#### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 75
- B. Rekomendasi..... 76

#### **DAFTAR PUSTAKA ..... 78**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel. 1. Jenis Perkebunan Menurut Pelaku Usaha .....	40
Tabel. 2. Kondisi Geografis Desa Datar .....	53
Tabel. 3. Jumlah Berdasarkan Jenis Kelamin .....	57
Tabel. 4. Jumlah Penduduk Menurut Usia .....	57
Tabel. 5. Perkebunan Menurut Jenis dan Luas Lahan .....	58
Tabel. 6. Lokasi Perkebunan Lahan, Jenis Dan Luas .....	60



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Panduan Wawancara;

Lampiran 2. Surat Keterangan Wawancara;

Lampiran 3. Surat Rekomendasi Penelitian Pemerintah Provinsi Lampung;

Lampiran 4. Surat Rekomendasi/Survei Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan;

Lampiran 5. Surat Rekomendasi Penelitian/Survei Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Lampiran 6. Surat Keterangan Izin Riset Desa Datar Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Lampiran 7. Blanko Konsultasi Skripsi;

Lampiran 8. Gambar Riset di Kantor Desa bersama Jajaran Aparat Pemerintah Desa Datar Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; dan

Lampiran 9. Gambar Pembukaan Lahan Perkebunan di Desa Datar Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan dalam beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini “Pembukaan Lahan Perkebunan Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh Siyasah” (Studi di Desa Datar Kecamatan Muara Dua Kabupaten OKU Selatan), sebagai berikut:

##### **1. Pembukaan Lahan Perkebunan**

- a. Pembukaan berasal dari kata dasar buka. Pembukaan adalah proses, cara dan perbuatan membuka. Pembukaan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Pembukaan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pembukaan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.
- b. Lahan, yaitu lahan diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air dan vegetasi serta benda yang berada di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan, termasuk di dalamnya hasil kegiatan manusia dimasa lalu dan

sekarang seperti hasil reklamasi laut, pembersihan vegetasi dan juga hasil yang merugikan seperti yang tersalinasi.<sup>1</sup>

- c. Perkebunan, adalah budidaya tanaman pangan maupun non-pangan yang berfungsi menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan, hasil devisa, oleh perusahaan.<sup>2</sup>

Pembukaan lahan perkebunan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam usaha tani yang didalamnya terdapat perencanaan tata ruangdan tata letak yang mana kegiatannya meliputi pengukuran areal, pembangunan infrastruktur, dan pembersihan lahan sampai dengan lahan siap ditanami.

## 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH

Yaitu Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan lainnya. Undang-undang berfungsi sebagai otoritas, yaitu untuk mengatur, menganjurkan, menyediakan, menghukum, dan mendeklarasikan sesuatu.

## 3. Perspektif Fiqih Siyash

- a. Perspektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata per-spek-tif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya), sudut pandang; pandangan.

---

<sup>1</sup>Jupri, "Pengertian Lahan", Jurnal Pendidikan Geografi, On-line tersedia di: <http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR.PEND.GEOGRAFI/196006151988031>, diakses pada 13 Februari 2020, pukul: 22.45 WIB.

<sup>2</sup> M.Ramadhan Julianti, ed. al. "Perancangan Sistem Informasi Investasi Perkebunan Pada PT. Kampoeng Kurma", *Jurnal Sisfotek Global*, ISSN: 2088-1762 Vol. 7 No.1 (Maret 2017), h. 130.

- b. *Fiqh Siyasah* adalah suatu ilmu yang memahami dan mengetahui wahyu (al-Quran dan al-Hadis) dengan menggunakan penalaran akal dan metode tertentu, sehingga diketahui ketentuan hukumnya.
4. Study di Desa Datar Kecamatan Muara Dua Kabupaten OKU Selatan
- a. Studi merupakan salah satu metode penelitian dalam suatu ilmu sosial yang digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis.<sup>3</sup>
  - b. Desa Datar adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Muara Dua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
  - c. Kecamatan Muara Dua adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan, dan serta sekaligus pusat pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Jadi kesimpulan daripada judul skripsi “Pembukaan Lahan Perkebunan Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh Siyasah” adalah menjelaskan proses bagaimana cara dalam membuka/pengelolaan lahan yang dijadikan lahan perkebunan sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga tidak menyebabkan kerusakan lingkungan, sebagaimana yang terjadi di Desa Datar Kecamatan Muara Dua, lalu kemudia dipandang berdasarkan perspektif fiqh siyasah.

---

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 153.

## **B. Alasan Memilih Judul**

### **1. Alasan Objektif**

Berdasarkan fakta yang terjadi di Desa Datar Kecamatan Muara Dua Kabupaten OKU Selatan terdapat pembukaan lahan perkebunan yang tidak sesuai prosedur yang diatur dalam undang-undang, seperti pembakaran hutan yang mayoritas melebihi luas 2 hektar, yang pada akhirnya dapat menyebabkan pencemaran udara/kerusakan lingkungan, dan merusak ekosistem, serta merugikan masyarakat itu sendiri.

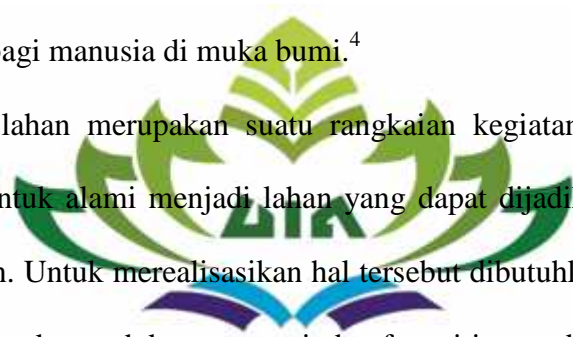
### **2. Alasan Subjektif**

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang pembukaan lahan perkebunan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, agar pembukaan lahan perkebunan dibuka secara baik-baik dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun kerugian orang lain pada umumnya dan khususnya di Desa Datar Kecamatan Muara Dua Kabupaten OKU Selatan.
- b. Tersedianya literatur juga sarana yang bisa mendukung penelitian dalam rangka menyelesaikan penelitian ilmiah ini.
- c. Permasalahan yang dipilih penulis sangat relevan dengan disiplin ilmu di Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



### C. Latar Belakang Masalah

Lahan merupakan suatu wilayah yang terdapat dipermukaan bumi dan terhadap semua komponen yang ada di dalamnya. Lahan merupakan bagian dari bentang lahan yang meliputi lingkungan fisik, termasuk iklim, tofografi atau relief, hidrologi tanah, keadaan vegetasi alami yang secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan atau areal tanah yang ingin ditanami, dan mendapatkan hasil produksi yang dapat dimanfaatkan manusia sebagai sumber energi bagi manusia di muka bumi.<sup>4</sup>



Pembukaan lahan merupakan suatu rangkaian kegiatan merubah fungsi lahan dalam bentuk alami menjadi lahan yang dapat dijadikan sebagai suatu area perkebunan. Untuk merealisasikan hal tersebut dibutuhkan sumber energi yang berguna untuk mendukung perwujudan fungsi itu sendiri. Sederhananya, pembukaan lahan dikerjakan dengan mengubah hutan menjadi perkebunan yang di dukung oleh ketersediaan fasilitas-fasilitas tertentu.

Sehubungan dengan itu, pembukaan lahan tidak terlepas dari awal mulanya lahan yaitu berupa hutan. Hutan merupakan sumber daya alam yang menepati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan ber-Negara. Nilai penting sumber daya terebut kian bertambah karena hutan merupakan sumber kehidupan orang banyak.<sup>5</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, tercantum dalam Pasal 1 angka 2 yang berbunyi:

---

<sup>4</sup> On-line tersedia di: <http://agroteknologiuisu.blogspot.com/2016/12/landclearingdan.htm> l, di akses pada 14 Februari 2020, pukul 16:30 WIB.

<sup>5</sup> Supriyadi Bambang Eko, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 68-69.

“Hutan adalah satu kesatuan sistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi tumbuhan pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan”.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan hal itu, Desa Datar adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Maura Dua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, secara geografis desa tersebut merupakan desa pedalaman yang dikelilingi lahan-lahan yang luas meliputi hutan-hutan. Dengan kondisi lingkungan seperti itu, maka masyarakat Desa Datar memanfaatkan alam sekitar dengan membuka lahan-lahan yang awalnya berbentuk hutan dan sebagainya untuk dijadikan lahan perkebunan. Berkaitan dengan itu, terhadap pembukaan lahan di Desa Datar yang mana pada proses awal kegiatan tersebut, secara umum lahan yang ditumbuhi pohon-pohon itu ditebangi, lalu setelah sisa-sisa tebangan pohon itu kering kemudian dibakar dengan luas lahan melebihi 2 Ha.

Sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait kegiatan pembukaan lahan perkebunan salah satunya dengan cara dibakar dalam Pasal 69 ayat 1 huruf h hanya membolehkan pembukaan lahan dengan cara dibakar dengan luas 2 hektar.<sup>7</sup> Kemudian pada ayat 2 dalam penjelasan Pasal 69 disebutkan bahwa:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal, yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 Ha per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekekelilingnya.”<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 1 Angka 9.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 69 ayat 1.

<sup>8</sup> *Ibid.*, Pasal 69 ayat 2 dan penjelasannya.

Thadap proses pembukaan lahan perkebunan yang terjadi di Desa Datar yang dilakukan dengan cara membakar lahan melebihi yang telah ditentukan, maka hal tersebut dapat menimbulkan kerusakan dan mengancam kelestarian lingkungan seperti pencemaran udara dan sebagainya seperti terjadi kebakaran lahan di Pulau Kalimantan misalnya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Bab Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1-3 disebutkan bahwa:<sup>9</sup>

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi ke dalam strategi pembangunan guna untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut UU PPLH dalam Pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>10</sup>

Dalam ajaran Islam berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yaitu dengan mengambil manfaat daripada alam sekitar dengan cara membuka lahan

---

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat 1-3, *Ibid.*,

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009...*Ibid.*,

perkebunan guna menunjang keberlangsungan hidup didunia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-A'raf ayat 10:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur”.<sup>11</sup>

Islam adalah agama yang *rahmatan lil'alami* yang juga mengatur masalah kelestarian lingkungan hidup. Namun dalam Islam melarang segala perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dimuka bumi dalam bentuk apapun, yang merugikan alam itu sendiri maupun orang lain sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.<sup>12</sup>

Dalam kajian *siyasah* dikenal dengan prinsip kedudukan manusia diatas bumi sebagai *khalifah* Allah SWT, yang menimbulkan peran-peran tertentu yang wajib harus dijalankan oleh manusia. Manusia bertugas untuk mengatur dan memimpin bumi dengan baik sesuai dengan kualitas dan sifat-sifat Allah. Menurut ajaran Islam, manusia adalah wakil Allah dimuka bumi, karena

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Qur'an* (Bandung: CV. Diponegoro, 2000), h. 125.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 120.

manusia mengemban kuasa yang didelegasikan Tuhan dalam batas-batas yang ditentukan-Nya dan bertugas melaksanakan kekuasaan Tuhan tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan.<sup>13</sup> Dengan demikian terhadap segala bentuk kegiatan manusia dalam rangka memanfaatkan alam harus didasari dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Prinsip hormat terhadap alam, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Anbiya ayat 107:

Ayat.....

Artinya: *“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”*.<sup>15</sup>

2. Prinsip tanggungjawab, bahwa hormat terhadap alam diatas merupakan tanggungjawab manusia terhadap alam.
3. Prinsip solidaritas, manusia dan makhluk lainnnya memiliki kedudukan yang sama di mata Allah SWT. Sehingga kenyataan ini membangkitkan dalam diri kepedulian terhadap alam dan makhluk hidup yang lainnya.
4. Prinsip kasih sayang dan pedulian terhadap alam, bahwa sudah menjadi sebuah keharusan sebagai sesama anggota komunitas ekologis yang setara, manusia dituntut untuk mencintai, menyayangi, dan melestarikan alam semesta dan seluruh isinya, tanpa diskriminasi dan tanpa dominasi.

Berangkat permasalahan diatas, untuk itu penulis tertarik ingin meneliti lebih dalam terhadap proses pembukaan lahan perkebunan dengan judul: “Pembukaan Lahan Perkebunan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun

---

<sup>13</sup> Abul A’la Al-Maududi, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Terjemahan Oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H, dari “Human Rights In Islam” (Jakarta; Bumi Aksara, 1995). h. 1-2

<sup>14</sup> *Ibid.*,

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Aliyy...*, h. 264.

2009 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh Siyasah”.(Study di Desa Datar Kecamatan Muara Dua Kabupaten OKU Selatan).

#### **D. Fokus Penelitian/Batasan Masalah**

1. Fokus penelitian, yaitu penelitian yang dilakukan spesifik dan sesuai dengan judul penelitian yang telah ditetapkan, penelitian ini terfokus kepada masalah Pembukaan Lahan Perkebunan Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh Siyasah. (Study di Desa Datar Kecamatan Muara Dua Kabupaten OKU Selatan).
2. Penelitian ini membatasi masalah ruang lingkup hanya pada Pembukaan Lahan Perkebunan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengolahan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh Siyasah”. (Study di Desa Datar Kecamatan Muara Dua Kabupaten OKU Selatan).

#### **E. Rumusan Masalah**

Ringkasan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pembukaan Lahan Perkebunan di Desa Datar Kecamatan Muara Dua Kabupaten OKU Selatan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Pembukaan Lahan Perkebunan Desa Datar Kecamatan Muara Dua Kabupaten OKU Selatan?

## F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan dampak daripada tercapainya penelitian ini, serta untuk menjelaskan tentang manfaat daripada penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun tujuan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pembukaan Lahan Perkebunan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengolahan Lingkungan Hidup di Desa Datar Kecamatan Muara Dua Kabupaten OKU Selatan, dan untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap pembukaan lahan perkebunan di Desa Datar.

## G. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini adalah:

1. Signifikansi atau manfaat secara teoritis yaitu merupakan sumbangan ilmu pengetahuan kepada pembaca untuk bisa mengetahui permasalahan yang dalam *fiqh siyasah* terhadap peraturan perundang-undang maupun peraturan pemerintah.
2. Manfaat praktisnya, untuk bisa memperluas khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis dan untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan Program Studi Siyasah Syar'iyah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Lampung.



## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara bagaimana suatu penelitian itu dilakukan.<sup>16</sup> Pembahasan penelitian ini agar sesuai dengan apa yang diharapkan, dan dapat terlaksana dengan objektif dan ilmiah, serta hasil yang maksimal. Maka diperlukan metode-metode penelitian untuk bertindak dan berfikir menurut aturan-aturan yang ilmiah. Dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reasearch*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.<sup>17</sup>
- b. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang akan diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan menggunakan data-data yang disusun, dijelaskan dan diimpresentasikan kemudian disimpulkan.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan mengamati kondisi dilapangan lalu kemudian dengan data yang didapat mengenai pembukaan lahan perkebunan akan diteliti secara sistematis.

---

<sup>16</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 19.

<sup>17</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Tarsoto: Bandung, 1995), h. 58.

<sup>18</sup> Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 7.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini meliputi:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.<sup>19</sup> Serta data-data yang berkaitan dengan pembukaan lahan perkebunan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

### b. Data Sekunder

Yaitu data yang mendukung data primer yang bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, majalah, makalah dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi ini.<sup>20</sup> Seperti data yang berkaitan dengan pembukaan lahan perkebunan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## 3. Metode Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara sistematis terhadap fakta-fakta yang diteliti atau diselidiki. Penulis melakukan observasi yang menjadi fokus adalah segala bentuk yang berkaitan dengan “Pembukaan Lahan Perkebunan di Desa Datar Kecamatan Muara Dua Kabupaten OKU Selatan”. Dari pencatatan sistematis dari pengumpulan fakta yang terjadi dilapangan dan juga mencatat untuk mendapatkan data-data yang konkrit dan jelas.

---

<sup>19</sup> Mohammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

<sup>20</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Bandung: Sinar Baru, 1991), h. 132.

b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban jawaban responden dicatat atau direkam.<sup>21</sup> Seperti kepala Desa, sekretaris, perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat di Desa Datar Kecamatan Muara Dua Kabupaten OKU Selatan.

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, catatan-catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, agenda tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan sebagainya, yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.<sup>22</sup>

4. Sampel dan Populasi

- a. Sampel adalah objek dari populasi yang diambil melalui teknik sampling yakni cara mereduksi objek penelitian dengan mengambil sebagian, yang dapat dianggap representatif terhadap populasi.<sup>23</sup> Seperti mewawancarai kepala Desa, sekretaris, perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat di Desa Datar Kecamatan Muara Dua Kabupaten OKU Selatan.
- b. Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu jelas dan lengkap. Pupolasi dalam penelitian ini adalah para pelaku pembukaan lahan perkebunan.

---

<sup>21</sup> Susiadi AS... h. 107.

<sup>22</sup> Jalaludin Rahmat, *Metodologi Penelitian Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h. 83.

<sup>23</sup> *Ibid.*,

### c. Metode Pengolahan Data

Setelah peneliti memperoleh data yang cukup untuk penulisan skripsi ini, maka selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut yaitu:

#### a. Pemeriksaan data (*editing*)

Yaitu metode pengecekan data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.<sup>24</sup>

#### b. Koding

Yaitu metode mengklafikasikan jawaban dari narasumber ke dalam kategori-kategori.<sup>25</sup> Atau memberikan catatan atau tanda yang menyatakan sumber data atau urutan rumusan masalah.

#### c. Rekonstruksi data

Yaitu suatu metode/cara menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan sistematis.

#### d. Sistematis data

Yaitu mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.<sup>26</sup>

### d. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara komparatif. Setelah keseluruhan data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis

---

<sup>24</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2015), h. 115

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet Ke-1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 9.

data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta yang umum dan peristiwa-peristiwa yang konkrit. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hukum Islam Tentang Siyasah Dusturiyah

##### 1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Istilah *fiqh siyasah* merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk terdiri dari kata *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, kata *fiqh* merupakan bentuk *mashdar* dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam, dan mampu memahami tujuan ucapan dan tindakan. Secara terminologis *fiqh* diartikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang mudah dipahami yang berasal dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>1</sup>

Menurut Ulama *Syara'* secara terminologis *fiqh* yaitu pengetahuan hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang *tafshili* atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya (al-Qur'an dan Sunnah). Dapat disimpulkan bahwa *fiqh* adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah.<sup>2</sup> Kata *fiqh* mempunyai arti paham atau memahami didukung oleh firman Allah SWT dalam Q.S. Hud ayat 91:

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا

---

<sup>1</sup> Mujar Ibnu Syarif & Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Erlangga, 2008), h. 2.

<sup>2</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), h. 27.

وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزٌّ

Artinya: “Mereka berkata, Hai Syu’aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami”.<sup>3</sup>

Adapun istilah lain dari *fiqh siyasah* dikenal dengan ilmu tatanegara Islam. Kata siyasah berasal dari kata “sasa” yang dalam kamus *al-Munjid* dan *Lisan al-Arab* mengandung arti mengatur, mengurus dan memerintah. Kata *siyasah* juga berarti pemerintah, politik dan membuat kebijaksanaan. Sedangkan secara terminologis dalam kamus *lisan al-Arab*, *siyasah* berarti mengatur atau memimpin sesuatu melalui cara yang membawa pada kemaslahatan. *Siyasah* juga dapat merupakan ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri maupun luar negeri yang mengatur perpolitikan baik dalam negeri maupun luar negeri.<sup>4</sup>

Menurut Ibn Al-‘Aqil sebagaimana dikutip Ibn Qayyim menjelaskan bahwa *siyasah* merupakan segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan. Sekalipun Nabi Muhammad SAW tidak pernah menetapkan bahkan Allah SWT menentukannya.<sup>5</sup> Jadi *fiqh siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Qur’an* (Bandung: CV. Diponegoro, 2000), h. 185.

<sup>4</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.22.

<sup>5</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pramedia Group, 2014), h. 2.



yang menerangkan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

Pada perkembangannya *fiqh siyasah* memiliki beberapa pembedaan. Menurut Imam al-Mawardi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup lima bidang, sebagai berikut:

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan);
- b. *Siyasah Harbiyyah* (hukum perang);
- c. *Siyasah Maliyyah* (ekonomi dan moneter);
- d. *Siyasah Qadha'iyyah* (peradilan) dan
- e. *Siyasah Idariyyah* (administrasi negara).<sup>6</sup>

Menurut Imam Ibn Tamimiyyah mendasarkan pada objek pembahasan *fiqh siyasah* dalam Q.S An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat”.<sup>7</sup>

Dan dalam al-Qur'an Surat An-Nissa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

<sup>6</sup>Ibid., h. 14.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Aliyy...*, h. 87

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (*al-Qur'an*) dan Rasul (*sunnahnya*), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (*bagimu*) dan lebih baik akibatnya”.<sup>8</sup>

Pada ayat Q.S an-Nisa ayat 58 menjelaskan dengan mereka yang memegang kekuasaan yang mempunyai kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak dan menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan ayat 59 berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat dan rakyat dari kalangan militer maupun kalangan lainnya, wajib mentaati Allah dan Rasul-Nya serta mematuhi pemerintah.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut T.M Hasbi Ash-Shiddieqy ruang lingkup *fiqh siyasah* meliputi delapan yaitu *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah*, *Siyasah Maliyyah*, *Siyasah Qadha'iyah*, *Siyasah Tasr'iyah Syar'iyah*, *Siyasah Dauliyah Syar'iyah*, *Siyasah Idariyyah Syar'iyah*, *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* dan *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah*.<sup>10</sup>

Sehubungan dengan masalah yang menjadi fokus dalam pembahasan ini yaitu kajian *siyasah dusturiyah* yang membahas konsep-konsep tentang undang-undang dasar negara, sejarah lahirnya perundang-undangan, cara

<sup>8</sup> *Ibid.*,

<sup>9</sup> Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyat fi islah al Ra'iyat* (dar Al-Kutub al-Arabiyyat, Beirut, 1996), h. 4.

<sup>10</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Penerjemah, Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer (Jakarta: Rajawali, 1993), h. 15.

perumusan, lembaga demokrasi dan *syura'* yang menjadi pilar penting dalam perundang-undangan.<sup>11</sup>

*Siyasah dusturiyah* merupakan ilmu yang membahas hubungan anatar pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain dan lembaga-lembaga yang ada didalamnya. Pada pembahasannya *siyasah dusturiyah* membahas pengaturan, perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan dalam Islam yang merupakan realisasi kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>12</sup>

Dalam *fiqh siyasah*, konstitusi disebut dengan *dustur*. Istilah *dustur* berasal dari bahasa Persia yang berarti seseorang yang memiliki otoritas baik dalam bidang politik dan agama. Perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan. Setelah mengalami proses penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang makna menjadi asas, dasar, atau pembinaan.

Sedangkan kata *dustur* menurut Abul A'la al-Maududi adalah “suatu dokumen yang memuat tentang prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan utama dalam peraturan suatu negara”.<sup>13</sup> Penggunaan istilah *fiqh dusturiyah*, untuk suatu kajian ilmu yang membahas pemerintahan dalam arti luas, karena dalam kata *dustur* memuat sekumpulan aturan prinsip

---

<sup>11</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 177.

<sup>12</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47.

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 52.

kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara, dalam peraturan perundang-undangannya tidak boleh bertentangan dengan kata *dustur* itu sendiri.<sup>14</sup>

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap masyarakat dan persamaan kedudukan di mata hukum, dengan tidak membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.<sup>15</sup> Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya.

## 2. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah

### a. Al-Qur'an

Yaitu landasan utama dalam ajaran agama Islam yang menjadi dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dengan bentuk ragam bahasa. Al-Qur'an merupakan sumber paling tinggi dalam menentukan suatu hukum yang mengatur segala bentuk aturan dalam kehidupan dan kandungan ayat-ayat al-Qur'an juga tidak mengalami perubahan apapun pada setiap perkembangan zaman yang terus berjalan.<sup>16</sup>

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 53.

<sup>15</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam...*, h. 178.

<sup>16</sup>On-line tersedia di: <https://www.suduthukum.com/2017/04/ruang-lingkup-siyasah-dusturiyah.html> (14 oktober 2018), diakses pada 11 Maret 2020, pukul: 13.03 WIB.

b. Sunnah

Berdasarkan harfiah sunnah merupakan suatu praktek ilmu dalam kehidupan yang oleh masyarakat diyakini sebagai segenap ucapan maupun perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW. Dalam proses periwayatan sunah tersebut disaksikan langsung oleh orang pada masa Rasulullah maupun kalangan sahabat hingga dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi sampai dengan akhir perawi hadis yang meriwayatkan dengan sesuai deretan riwayat hadis tersebut.<sup>17</sup>

c. *Ijma*

Dalam hukum Islam *ijma* merupakan suatu keputusan hukum bersama dalam menentukan hukum yang benar berdasarkan hukum Islam demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah yang timbul atas pemikiran para ulama *mufti*, jajaran pemerintahan dan ahli *fiqh*. Jika dalam kesepakatan itu lebih banyak dari kalangan ulama yang tidak setuju maka *ijma* dinyatakan batal.<sup>18</sup> Metode *ijma* terdapat dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَوَلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Dan kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka

<sup>17</sup> Ridwan HR, *Fiqh Politik; Gagasan Harapan dan Kenyataan* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 20110), h. 53.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 54.

*kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*( Q.S. An-nisa ayat 59).

d. *Qiyas*

Yaitu metode logika yang digunakan untuk menemukan hukum suatu persoalan yang berkaitan dengan legalitas dari wujud tindakan tertentu dengan metode menentukan satu kaitan positif dan negatif dari bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya terhadap suatu prinsip umum.<sup>19</sup> Cara ini biasanya digunakan dalam menentukan hukum-hukum yang jelas dan kompleks. Pada metode ini menggunakan dalil dari al-Qur'an dan hadis yang sama bentuk perbuatan hukum yang sedang terjadi. Adapun metode *qiyas* terbagi ke beberapa bidang diantaranya:

1. *Qiyas al-Aulawi*

Yaitu analogi yang illat hukum cabangnya lebih kuat (*far'u*) dari pada *illat* pada hukum dasarnya. Yaitu suatu yang sudah dijelaskan oleh *nash* al-Qur'an dan hadis terhadap keharaman melakukannya dengan jumlah yang sedikit, maka keharamannya dalam jumlah banyak itu lebih diutamakan.

2. *Qiyas al-Mushawi*

Yaitu metode *qiyas* yang pada kekuatan illat hukum cabang sama dengan kekuatan hukum asal. *Qiyas* ini disebut dengan

---

<sup>19</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 56.

istilah *qiyasfi ma'na al-Asal* (analogy terhadap makna hukum asal) yaitu al-Qur'an dan hadis nabi, analogy yang jelas (*qiyas jail*), dan *qiyas bi nafsi al-fariq* (analogi sama *illat*). Menurut para ulama yaitu apa yang telah dihalalkan maka halal hukumnya dan apa yang telah diharamkan maka haram hukumnya.

### 3. *Qiyas al-Adna*

Adalah analogi yang mana *illat far'* (hukum cabangnya) lebih lemah dari *illat* pada hukum asal. Menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya *ar-Risalah*, ia menjelaskan bahwa sebagian ulama tidak mengatakan *qiyas*, kecuali terdapat kemungkinan kesamaan yang kemudian dapat ditetapkan dari dua arti yang berbeda, kemudian dianalogikan kepada salah satu arti tersebut, tidak kepada yang lainnya.

### 3. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

*Siyasah dusturiyah* adalah ilmu yang membahas masalah perundang-undangan yang membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan *syura'* adalah sebagai pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Dalam kajian ini membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*,



Berkenaan dengan ruang lingkup *siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang luas. Namun demikian, secara umum disiplin ilmu *siyasah dusturiyah* meliputi:

- a. Persoalan *imamah*, hak dan kewajiban;
- b. Persoalan rakyat, status dan hak-haknya;
- c. Persoalan *bai'at*;
- d. Persoalan *waliul ahdi*;
- e. Persoalan perwakilan;
- f. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*;
- g. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.<sup>21</sup>

Permasalahan dalam *siyasah dusturiyah* umumnya tidak terlepas dari dua hal yang menjadi dasar. *Pertama*, dalil-dalil *kulliy* baik dari ayat al-Qur'an, hadist, *maqhasidu syari'ah* serta semangat ajaran Islam dalam mengatur rakyat. Karena dalil-dalil *kulliy* itu menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalam hasil *ijtihad* para ulama.

Terhadap objek kajian *siyasah dusturiyah*, menurut H.A. Djazuli ia bahwa “persoalan dalam *siyasah dusturiyah* menyangkut hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain dan lembaga-lembaga yang ada didalam masyarakat. Dalam *siyasah dusturiyah* biasanya hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal

---

<sup>21</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi....*, h. 73-74.

ihwal negara dari segi kesesuaian dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dan yang merupakan realisasi kemaslahatan serta memenuhi kebutuhannya.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut Suyuthi Pulungan bahwa objek kajian *fiqh siyasah* meliputi hubungan antara pemerintah dan rakyatnya yang dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, kajian pertama dari *fiqh siyasah* adalah kajian *fiqh siyasah dusturiyah*. Hal yang penting dalam kaitannya dengan *siyasah dusturiyah* yaitu pembuatan undang-undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang menyangkut berbagai aturan kehidupan masyarakat dalam bernegara.

Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin dapat dikategorikan sebagai *tasyri'* karena secara definitive *tasyri'* merupakan kata yang diambil dari kata *lafadz syari'ah* yang memiliki makna jalan yang lurus. Sedangkan secara istilah *tasyri'* menurut para *fuqaha* diartikan sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya yang diturunkan melalui perantara Rasulullah SAW agar manusia melaksanakan hukum tersebut dengan keimanan kepada Allah SWT, baik hukum yang berkaitan dengan persoalan terhadap akidah, akhlak dan budi pekerti. Dalam pengertian ini dapat disimpulkan kata *tasyri'* berarti menciptakan undang-undang dan membuat kaidah-kaidah.<sup>23</sup>

Jika melihat sisi lain dari *siyasah dusturiyah* dapat dibagi sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 73.

<sup>23</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 36

- a. *Siyasah tasyri'iyah*, termasuk yang membahas permasalahan *ahl al-hall wa al-'aqd*, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslimin beserta non-muslim disuatu negara seperti undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
- b. *Siyasah tanfidhiyah*, persoalan *masalah imamah, bai'ah, wizarah, waliy al-ahdi*, dan sebagainya.
- c. *Siyasah qadha'iyah*, termasuk masalah tentang peradilan.
- d. *Siyasah idariyah*, masalah administratif dan kepegawaian.<sup>24</sup>

Berkaitan dengan hal itu, tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat, maka negara mempunyai tugas-tugas penting dalam rangka merealisasikan tujuan itu. Diantaranya ada tiga tugas utama negara dalam hal ini meliputi:

- a. Menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam

Dalam rangka melaksanakan tugas ini, maka negara mempunyai kewenangan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*), yang mana negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpensi, analogi, inferensi terhadap nash-nash al-Qur'an dan hadis. Usaha negara dalam rangka memahamai dan mencari maksud yang sebenarnya terhadap tuntunan hukum yang dijelaskan *nash* yaitu merupakan wujud dari pada bentuk interpretasi negara.

---

<sup>24</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi...*, h. 48.

Terhadap analogi dalam melakukan metode *qiyas* mengenai suatu hukum yang ada nashnya atas persoalan yang sedang terjadi harus merujuk kepada sebab hukum. Sementara *inferensi* adalah metode dalam membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip *syari'ah* dan kehendak *syar'i*. Jika tidak ditemukan nashnya sama sekali maka wilayah kekuasaan legislatif menjadi luas, sejauh tidak bertentangan/menyimpang dari kaidah-kaidah ajaran Islam.

b. Tugas melaksanakan undang-undang

Negara mempunyai kekuasaan *al-sulthah al-tanfidiyah* untuk menjelaskan perundang-undangan yang telah selesai dirumuskan. Pada bagian ini, negara melakukan kebijakan baik yang berkaitan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain. Pelaksana tertinggi yaitu pemerintah (pimpinan negara) yang dibantu para pembantunya yaitu dewan menteri yang dibentuk berdasarkan kebutuhan situasi. Berkaitan dengan semua kebijakan-kebijakan hukum yang diambil oleh badan legislatif juga tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam dan *kemaslahatan* umat.

c. Tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat lembaga legislatif.<sup>25</sup>

Tugas ini dilakukan lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Kekuasaan lembaga ini meliputi *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran ringan seperti kecuraan dan

---

<sup>25</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi...*, h. 157-158

penipuan dalam bisnis, wilayah *al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan maslah antara sesama warganya, baik dalam hal perdata maupun pidana) dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menangani perkara penyelewengan pejabat negara terhadap tugasnya. Seperti pembuaatan kebijakan politik yang merugikan kepentingan dan melanggar hak-hak rakyat.

#### 4. Pembukaan Lahan Perkebunan Menurut Siyasah Dusturiyah

Secara tekstual dalam al-Qur'an tidak ada ayat yang menjelaskan secara detail tentang negara dan cara bernegara, akan tetapi dasar pokok tentang hidup bernegara dan pemerintahan dijelaskan dalam al-Qur'an. Dari konsep ini *fiqh siyasah* dikembangkan hingga menjadi bidang ilmu dan pengetahuan yang menjabarkan tentang politik dan bernegara.<sup>26</sup>

Selanjutnya ruang lingkup kajian *siyasah* mencakup hubungan antara warga negara yang satu dengan yang lainnya, antara warga negara dengan lembaga negara dan hubungan antara lembaga-lembaga negara lainnya. Dari persoalan ini maka tampak bahwa kajian *siyasah* mengutamakan tentang perhatian terhadap pengaturan demi terciptanya kemaslahatan bagi umat.<sup>27</sup>

Dalam kajian *siyasah* dikenal prinsip kedudukan manusia diatas bumi sebagai khalifah Allah SWT, yang menimbulkan peran-peran tertentu yang harus dijalankan oleh manusia. Manusia bertugas untuk mengatur dan memimpin bumi dengan baik sesuai dengan kualitas dan sifat-sifat

<sup>26</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h. 1.

<sup>27</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 29.



Allah tetapi hanya sebatas kemampuan manusia. Oleh sebab itu, manusia harus menyebarkan kebaikan dan mencegah serta menghilangkan segala bentuk kemudharatan dimuka bumi.

Menurut Abul A'la al-Mududi bahwa prinsip kekhalifahan manusia sebagai salah satu dari tiga prinsip yang mendasari sistem politik Islam, dan terhadap dua prinsip lainnya adalah prinsip Ke-Esaan Tuhan (tauhid) dan prinsip kerasulan. Menurut ajaran Islam, manusia adalah wakil Allah dimuka bumi, karena manusia mengemban kuasa yang didelegasikan Tuhan dalam batas-batas yang ditentukan-Nya dan bertugas melaksanakan kekuasaan Tuhan tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan.<sup>28</sup> Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi”, Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah dimuka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.<sup>29</sup>

Berkenaan dengan itu, terhadap pola hubungan antar manusia yang menuntut pengaturan *siyasah*, maka *fiqh siyasah dusturiyah* adalah mengatur hubungan antar warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas

<sup>28</sup> Abul A'la Al-Maududi, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Terjemahan Oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H, dari "Human Rights In Islam" (Jakarta; Bumi Aksara, 1995). h. 1-2

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Aliyy...*, h. 6.

administratif suatu negara.<sup>30</sup> Dalam membuat kebijakan seorang pemimpin harus bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat.

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Umar bin Khattab ra. yang diriwayatkan Sa'id bin Manshur, ia berkata:

Artinya: *“Sesungguhnya aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah SWT seperti kedudukan seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan, aku mengambil dari padanya, jika aku dalam kemudahan, aku mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan, aku menjauhinya”*.<sup>31</sup>

Diciptakannya manusia untuk menjadi *khalifah* Allah di muka bumi dengan segala sesuatu baik daratan, lautan, matahari, bulan, malam, siang, tanaman, buah-buahan, binatang melata, binatang ternak dan sebagainya diciptakan untuk menunjang keberlangsungan hidup dan kemaslahatan manusia.<sup>32</sup> Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-A'raf ayat 10:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya: *“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur”*.<sup>33</sup>

Pada tahap selanjutnya, sebagai makhluk hidup manusia senantiasa berinteraksi dengan sesama manusia dan lingkungan hidupnya. Apabila terjadi perubahan pada sifat lingkungan alam sekitar yang melampaui batas kemampuan manusia baik perubahan yang bersifat alami maupun

<sup>30</sup> A. Djazuli, *Fiqh...*, h. 31.

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 41.

<sup>32</sup> Heru Kurniawan, “Prinsip Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berbasis Biosentris Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Nuansa* Vol. 14, No. 1 (1 Januari-Juni 2017), h. 95.

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 120.

perbuatan manusia itu sendiri, maka kelangsungan hidup akan terancam.<sup>34</sup>

Pada umumnya masalah perubahan lingkungan hidup terjadi akibat dua hal, diantaranya:

- a. Kejadian alam bersifat alami yang terjadi karena proses alam itu sendiri.
- b. Sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melakukan intervensi terhadap alam, baik yang sudah direncanakan maupun yang tidak direncanakan.<sup>35</sup>

Persoalan lingkungan hidup adalah tanggungjawab manusia sebagai *khalifah* dan merupakan amanat yang diembannya, untuk memelihara dan melindungi alam yang diciptakan Allah sebagai tempat tinggal manusia di bumi. Manusia beriman dituntut untuk memfungsikan imannya dengan meyakini bahwa pemeliharaan lingkungan hidup adalah bagian dari pada iman itu sendiri.<sup>36</sup>

Berkaitan dengan aktivitas manusia dalam pemanfaatan alam sekitar yaitu terhadap pembukaan lahan perkebunan guna menunjang kebutuhan dan keberlangsungan hidup, dalam hukum Islam tidak melarang namun harus dilakukan secara seimbang dan tidak berlebihan, sehingga tidak mengancam/merusak kelestarian alam itu sendiri dan tidak merugikan orang lain. Sebagai mana Allah berfirman dalam Q.S. Al-A'raf ayat 56:

---

<sup>34</sup> Ottoe Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), h. 18.

<sup>35</sup> Abdillah Mujiono, *Fiqh Lingkungan Panduan Spritual Hidup Berwawasan Lingkungan* Cet. Ke-1 (Yogyakarta: UUP AMPYKPN, 2005), h. 11.

<sup>36</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: UFUK Press, 2006), h. 159-160.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah SWT amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.<sup>37</sup>

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga dijelaskan dalam hadis shahih yang diriwayatkan oleh Shakhiahain Dari Anas *radhiyallahu ‘anhu* bahwa Nabi *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* bersabda:

Artinya: “Tidak seorang pun muslim yang menanam tumbuhan atau bercocok tanam, kemudian buahnya dimakan oleh burung atau manusia atau binatang ternak, kecuali yang dimakan itu akan bernilai sedekah untuknya”.<sup>38</sup>

Pada prinsipnya persoalan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup memiliki keterikatan yang erat dengan kesejahteraan rakyat suatu negara. Kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama bernegara, yang segala aktivitas negara berorientasikan pada upaya pencapaian dalam memenuhi kesejahteraan rakyat.<sup>39</sup>

Dalam bahasa arab istilah pengelolaan lingkungan dikenal dengan *fiqhul bi’ah*. Kata *fiqh bi’ah* terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *al-bi’ah*. Secara bahasa *fiqh* berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti *al-*

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al-Aliyy...*, h. 125.

<sup>38</sup> Jumarddin La Fua, “Aktualisasi Pendidikan Islam Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kesalehan Ekologis”, *Jurnal Al-Ta’dib*, Vol. 7 No. 1 (Januari-Juni 2014), h. 34.

<sup>39</sup> Dani Amran Hakim, “Politik Hukum Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No 23 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 2, (April-Juni 2015).

*ilmu bis-syai'i* (pengetahuan terhadap sesuatu) *al-fahmu* (pemahaman).<sup>40</sup>

Sedangkan *al-bi'ah* berarti lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri. *Fiqhul bi'ah* adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perbuatan manusia terhadap lingkungan hidupnya, untuk mewujudkan *kemashlahatan* penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan dan mendatangkan *kemaslahatan*.<sup>41</sup>

Secara umum dalam aktivitasnya manusia mengemban tiga amanat dari Allah SWT sebagai berikut:

- a. *Al-intifa'* yaitu mengambil manfaat dan mendayagunakan hasil alam dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan dan *kemaslahatan*.
- b. *Al-i'tibar*, yaitu manusia dituntut untuk senantiasa memikirkan dan menggali rahasia di balik ciptaan Allah SWT seraya dapat mengambil *ibrah* dari berbagai kejadian dan peristiwa alam.
- c. *Al-islah* yaitu manusia diwajibkan untuk menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan itu. Allah telah memberikan fasilitas daya dukung lingkungan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam dapat dinyatakan bahwa status hukum pelestarian lingkungan adalah wajib.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Muhammad bin Ya'qub al-Fayrus Abadi, "Al-Qamus Al-Muhith", Beirut: Muassasah Ar Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab, Vol 1, No 1 (Februari-Agustus 2019), ISSN: 2685-8924. e-ISSN:2685-8681.

<sup>41</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Ushul al-fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), h. 15.

<sup>42</sup> *Ibid.*,



Dengan demikian, manusia dituntut untuk selalu membiasakan diri bersikap ramah terhadap lingkungan sekitarnya. Adapun prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh oleh manusia dalam beraktivitas memanfaatkan alam sekitar diantaranya:

a. Prinsip hormat terhadap alam

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Anbiya ayat 107:

Artinya: *“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”*.<sup>43</sup>

Rahmat bagi alam semesta bukan hanya sekedar dijadikan sebagai motto Islam, akan tetapi merupakan tujuan dari Islam itu sendiri. Atas tujuan tersebut, maka Islam mempunyai kewajiban untuk mengelola dan menghormati alam semesta.

b. Prinsip tanggung jawab

Berkaitan dengan prinsip hormat terhadap alam diatas merupakan tanggung jawab manusia terhadap alam. Sebab manusia diciptakan sebagai *khalifah* dimuka bumi.

c. Prinsip solidaritas

Yaitu manusia dan makhluk lainnya memiliki kedudukan yang sama di mata Allah. Sehingga kenyataan ini membangkitkan dalam diri kepedulian terhadap alam dan makhluk hidup yang lainnya.

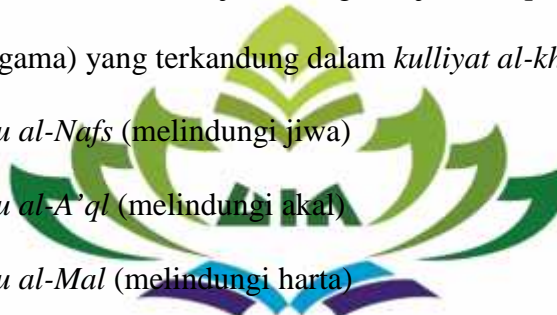
d. Prinsip kasih sayang dan peduli terhadap alam

---

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Aliyy...*, h. 264.

Bahwa sudah menjadi sebuah keharusan sebagai sesama anggota komunitas ekologis yang setara, manusia dituntut untuk mencintai, menyayangi, dan melestarikan alam semesta dan seluruh isinya, tanpa diskriminasi dan tanpa dominasi.

Sedangkan menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya *Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Islam*, bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup merupakan upaya untuk menciptakan *kemaslahatan* dan mencegah *kemudharatan*.<sup>44</sup> Hal ini sejalan dengan tujuan *maqasid al-syari'ah* (tujuan syari'at agama) yang terkandung dalam *kulliyat al-khams* sebagai berikut:

- 
1. *Hifzu al-Nafs* (melindungi jiwa)
  2. *Hifzu al-A'ql* (melindungi akal)
  3. *Hifzu al-Mal* (melindungi harta)
  4. *Hifzu al-Nasb* (melindungi keturunan)
  5. *Hifzu al-Din* (melindungi agama).<sup>45</sup>

Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup menurut beliau, merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan *syari'at* (hukum Islam) tersebut. Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada pengerusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Ushul al-fiqh...*, h. 44.

<sup>45</sup> *Ibid.*,

<sup>46</sup> Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 165.

## B. Pembukaan Lahan Perkebunan

### 1. Pengertian Perkebunan

Perkebunan merupakan suatu kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan iptek, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.<sup>47</sup>

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tentang Pembukaan Lahan Perkebunan yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.<sup>48</sup>

Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2004 Tentang Perkebunan adalah:

“Segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai dengan mengelolah, memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan, teknologi, permodalan dan manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat”.<sup>49</sup>

Perkebunan juga memiliki banyak pengertian tergantung kepada aspek pengelompokannya, yang kemudian apakah akan lebih menekankan pada fungsinya, pengelolaan, atau produk yang dihasilkan. Namun berdasarkan

---

<sup>47</sup> Buku Pembakuan Statististik Perkebunan, mengacu pada UU No.18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan serta Buku Konsep dan Defenisi Baku Statistik Pertanian Badan Pusat Statistik (2007).

<sup>48</sup> Peraturan Menteri Pertanian No. 05 pasal 1 ayat (1) Tentang Pembukaan dan/atau Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.

<sup>49</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2004 Tentang Perkebunan.

fungsinya perkebunan dapat diartikan sebagai usaha untuk menciptakan lapangan kerja, peningkatan pendapatan serta devisa negara dan pemeliharaan sumber daya alam.

Sedangkan berdasarkan pengelolaan perkebunan dapat dibagi menjadi perkebunan rakyat, perkebunan besar, perkebunan perusahaan inti rakyat dan unit pelaksanaan proyek. Perkebunan berdasarkan produknya dapat juga diartikan sebagai usaha budidaya tanaman yang ditujukan untuk menghasilkan bahan industri, seperti tebu, teh, kopi, kayu manis, karet, dan sawit.<sup>50</sup>

Adapun manfaat dari diselenggarakan perkebunan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, dan berkeadilan. Sedangkan tujuan pengelolaan perkebunan meliputi:

- a. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. Meningkatkan penerimaan negara;
- c. Meningkatkan penerimaan devisa negara;
- d. Menyediakan lapangan kerja;
- e. Meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing;
- f. Memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri, dan
- g. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam.<sup>51</sup>

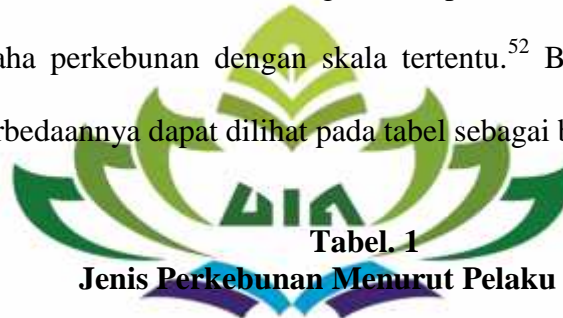
---

<sup>50</sup> Delly Yohanna Tumanggor, "Dampak Pemanfaatan Limbah Padat Kelapa Sawit Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di PT. Perkebunan Nusantara IV Bah Jambi (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2012), h. 10.

<sup>51</sup> On-line tersedia di <https://id.wikipedia.org/wiki/Perkebunan>, diakses pada 14 Februari, pukul: 16.45 WIB.

Selanjutnya berdasarkan pelaku usaha perkebunan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

- a. Pekebun adalah usaha-usaha perorangan yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu, atau lebih dikenal dengan perkebunan rakyat.
- b. Perusahaan perkebunan merupakan pelaku usaha perkebunan yang berbentuk badan hukum meliputi koperasi dan perseroan terbatas baik badan usaha milik negara maupun swasta, yang mengelolah usaha perkebunan dengan skala tertentu.<sup>52</sup> Berikut secara konkrit perbedaannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



**Tabel. 1**  
**Jenis Perkebunan Menurut Pelaku Usaha**

No	Perkebunan Rakyat	Perkebunan Besar
1	Luas Lahan sempit	Luas Lahan Besar
2	Modal usaha	Modal kuat
3	Teknologi sederhana	Teknologi maju
4	Pengelolaan konvensional	Pengelolaan modern

Sumber: <https://budidayatanaman-perkebunan.><sup>53</sup>

## 2. Pengertian Pembukaan Lahan Perkebunan

Lahan merupakan suatu wilayah yang terdapat dipermukaan bumi, terhadap semua komponen yang terkait di dalamnya. Lahan merupakan bagian dari bentang lahan (*landscape*) yang meliputi lingkungan fisik termasuk iklim, topografi atau relief, hidrologi tanah keadaan vegetasi

<sup>52</sup> *Ibid.*,

<sup>53</sup> On-line, tersedia di <https://budidayatanaman-perkebunan.blogspot.com>, diakses pada 14 Februari 2020, pukul 15.00 WIB.



alami yang secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan atau areal tanah yang ingin ditanami, dan mendapatkan hasil produksi yang dapat dimanfaatkan manusia sebagai sumber energi bagi manusia di muka bumi ini.<sup>54</sup>

Pembukaan lahan merupakan sebuah kegiatan merubah fungsi lahan dalam bentuk alami menjadi lahan yang dapat dijadikan sebagai suatu area perkebunan. Untuk merealisasikan hal tersebut dibutuhkan sumber energi yang dapat berguna untuk mendukung perwujudan fungsi tersebut. Sederhananya, bahwa pembukaan lahan perkebunan merupakan rangkaian kegiatan dengan mengubah hutan menjadi perkebunan yang didukung oleh ketersediaan fasilitas-fasilitas tertentu.

Dalam Undang-Undang PPLH tidak mendefinisikan mengenai lahan dan hutan itu sendiri. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, yaitu dirumuskan pada Pasal 1 angka (1) dan (2). Pasal 1 angka (1) bahwa;

“Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”. Pasal 1 angka (2), lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan diluar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat”.

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forest* (Inggris). *Forest* merupakan dataran tanah yang bergelombang, dan dapat

---

<sup>54</sup>On-line tersedia di: <http://agroteknologiuisu.blogspot.com/2016/12/landclearingdan.htm> 1, di akses pada 14 Februari 2020, pukul 16:30 WIB.

dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris kuno, *forest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung.<sup>55</sup>

Menurut Dengler, yang dimaksud dengan hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan atau pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat-tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horisontal dan vertikal).<sup>56</sup>

Pengertian hutan juga disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Ada 4 unsur yang terkandung dari definisi diatas, yaitu:

- a. Unsur lapangan yang cukup luas (minimal  $\frac{1}{4}$  hektar), yang disebut tanah hutan;
- b. Unsur pohon (kayu, bamboo, palem), flora, dan fauna;
- c. Unsur lingkungan; dan
- d. Unsur penetapan pemerintah.<sup>57</sup>

Unsur pertama, kedua, dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan disini

---

<sup>55</sup> Salim. H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Cet Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 40.

<sup>56</sup> Ngadung. I.B, *Ketentuan Umum Pengantar Ke Hutan dan Kehutanan di Indonesia* (Ujung Pandang: Pusat Latihan kehutanan, , 1976), h. 3.

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

menganut konsepsi hukum secara vertikal, karena antara tanah, pohon, flora, dan fauna, beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang utuh. Adapun dari segi fungsinya hutan memiliki berbagai macam fungsi diantaranya:

- a. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
- b. Hutan lindung, kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
- c. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi-fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
- d. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi-fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa ekosistemnya, yang berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

### **3. Konsep Pembukaan Lahan Perkebunan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH**

Secara umum lingkungan hidup dapat diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita

tinggali, mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.<sup>58</sup> Berkaitan dengan hal itu, kegiatan pembukaan lahan perkebunan yaitu dengan merubah fungsi lahan dalam bentuk alami menjadi lahan yang di jadikan sebagai suatu area perkebunan harus berdasarkan prosedur yang sudah ditetapkan pemerintah, agar dalam kegiatan pembukaan lahan itu sendiri tidak menimbulkan dampak yang negatif baik terhadap ekosistem sekitar, lingkungan alam, dan manusia.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Bab I Ketentuan Pasal (1) telah menetapkan ketentuan umum mengenai konsep atau batasan lingkungan hidup serta berbagai hal lainnya yang bersangkutan dengan lingkungan hidup. Aturan ini merupakan konsep pengembangan dan penyempurnaan dari beberapa konsep sebelumnya.<sup>59</sup> Dalam Undang-Undang PPLH ini disebutkan dalam Pasal 1 bahwa:

- (1) Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, serta makhluk hidup, termasuk manusia perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- (2) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
- (3) Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi akan datang.

---

<sup>58</sup> Yonathan Pengtulan, *Manajemen Sumber Daya alam dan Lingkungan* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015), h. 51.

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1.

- (4) Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
- (5) Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh dan menyeluruh serta saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
- (6) Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup.
- (7) Daya dukung lingkungan hidup merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
- (8) Daya tampung lingkungan hidup adalah merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
- (9) Sumber daya alam adalah unsur lingkungan yang terdiri dari atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
- (10) Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah suatu rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, partisipatif guna untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar, terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (11) Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- (12) Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak akan berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Terhadap pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka membuka lahan perkebunan harus diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat, yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan



masyarakat seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Tentang PPLH harus dilaksanakan berdasarkan asas:<sup>60</sup>

Pasal 1 butir (1-5):

- (1) Tanggung jawab negara;
- (2) Kelestarian dan keberlanjutan;
- (3) Keserasian dan keseimbangan;
- (4) Keterpaduan;
- (5) Manfaat;

Terhadap tujuan yang hendak dicapai dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam Pasal 3 UU PPLH yaitu:<sup>61</sup>

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. Melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Untuk mencapai tujuan itu sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 3 UU PPLH diatas, masyarakat diberikan hak, kewajiban dan kesempatan untuk ikut berperan serta dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Keterkaitan masyarakat dalam rangka mengelola dan melindungi lingkungan hidup menunjukkan arti bahwa lingkungan hidup merupakan

---

<sup>60</sup> *Ibid.*,

<sup>61</sup> *Ibid.*, Pasal 3.

tanggung jawab bersama dan bukan tanggung jawab pemerintah semata. Terhadap hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada masyarakat terkandung dalam Pasal 65 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH yaitu:<sup>62</sup>

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan yang diakibatkan adanya dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diatur dalam Peraturan Menteri.

Kerusakan lingkungan atas pembukaan lahan perkebunan di Indonesia secara umum disebabkan pengelolaan lahan yang dilakukan dengan cara diluar aturan yang ditentukan dalam undang-undang. Dalam undang-undang secara normatif memang tidak melarang untuk mengolah hutan untuk membuka lahan perkebunan, ketentuan pengolahan hutan dalam hal membuka lahan baru memang tidak diatur secara eksplisit langsung, akan tetapi dari ketentuan umum tersebut diatur dalam Undang-Undang PPLH mencerminkan pengelolaan hutan yang benar dalam kegiatan membuka lahan baru dijelaskan dalam Bab I Tentang Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum, yang pada hakekatnya untuk melindungi lingkungan hidup. Selanjutnya terkait

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, Pasal 65.

prosedur seperti izin-izin yang harus dipatuhi oleh para pengusaha dan masyarakat menjadi upaya penegakan hukum.

Lebih lanjut, terkait dengan kegiatan pembukaan lahan perkebunan salah satunya dengan cara dibakar dalam Pasal 69 ayat 1 huruf H hanya membolehkan pembukaan lahan dengan cara dibakar dengan luas 2 hektar.<sup>63</sup> Kemudian pada ayat 2 dalam penjelasan Pasal 69 disebutkan bahwa:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal, yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per KK untuk ditanami jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekekelilingnya.”<sup>64</sup>

Namun pada prinsipnya pembukaan lahan dengan cara membakar dan bisa menjadi suatu kelemahan hukum yang dapat di manfaatkan oleh oknum masyarakat atau badan hukum untuk mendapatkan keuntungan lebih seperti pembukaan lahan yang luasnya lebih dari 2 hektar, akibat api yang menjadi besar dan merambat dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan. Terhadap pelanggaran dalam pembukaan lahan perkebunan dengan cara dibakar yang melebihi luas 2 Ha sanksi yang dapat dikenakan terkandung dalam Pasal 108 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH disebutkan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, Pasal 69 ayat 1.

<sup>64</sup> *Ibid.*, Pasal 69 ayat 2 dan Penjasannya.

<sup>65</sup> *Ibid.*, Pasal 108.

### C. Tinjauan Pustaka

- a. Skripsi yang berjudul “Pelestarian Lingkungan Dalam Pandangan Islam (Studi di Desa Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat). Oleh Hipzon, Jurusan Aqidah Dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa: (1) pelestarian lingkungan pada hakikatnya adalah suatu yang harus dijaga disetiap masyarakat bukan dirusak walaupun di dalamnya masyarakat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari lingkungan tapi sangat di sayangkan kesadaran masyarakat sangatlah minim akan pelestarian lingkungan. (2) Relasi pelestarian lingkungan dalam pandangan hukum Islam bentuk suatu anjuran yang bernilai positif karena menjaga apa yang sudah Allah ciptakan untuk manusia bukan untuk dirusak.
- b. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pencemaran Udara. (Studi di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Ulubelu Kabupaten Tanggamus). Teguh Hermawan Jurusan Siyasah Syar’iyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung 2018. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian yaitu Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dalam pengendalian pencemaran udara adalah 1) Pemantauan kualitas udara ambien melalui metode Passive Sampler. 2)

Pengawasan preventif dan refresif atau pengawasan rutin dan pengawasan sewaktu-waktu.

- c. Skripsi yang berjudul “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Etika Islam, Ida Munfarida 2014, Fakultas Ushuluddin jurusan Aqidah Filsafat. Dalam tulisan ini banyak memberikan pemahaman tentang hakikat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terdapat dalam UUD yang kemudian dianalisis dengan Etika Islam.
- d. Skripsi yang berjudul “Akhlak Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Al-Qur'an”. Oleh Tatik Maisaroh. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian bahwa akhlak terhadap lingkungan hidup dalam al-Qur'an menurut M.Quraish Shihab yaitu dengan berbuat baik terhadap alam, mensyukuri nikmat yang Allah SWT berikan dan berlaku seimbang terhadap semua makhluk. Namun sayang, hal tersebut belum terwujud dengan baik di Indonesia. Undang-undang khususnya tentang lingkungan hidup juga belum terlaksana sebagaimana mestinya. Sehingga banyak terjadi krisis lingkungan di bentang bumi ini, hal ini juga di sebabkan oleh persoalan moral dan akhlak manusia yang menjadi pemicu kerusakan tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Hadist

Kementrian Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an, 1982).

### B. Buku

Abd al-Wahhab Khallaf, *Ushul al-fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978).

Abdillah Mujiono, *Fiqh Lingkungan Panduan Spritual Hidup Berwawasan Lingkungan* Cet. Ke-1 (Yogyakarta: UUP AMPYKPN, 2005).

Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Penerjemah, Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer (Jakarta: Rajawali, 1993).

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet Ke-1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

Abul A'la Al-Maududi, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Terjemahan Oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H, dari "*Human Rights In Islam*", (Jakarta; Bumi Aksara, 1995).

Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: UFUK Press, 2006).

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008).

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: Pustaka Setia, 2015).

Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003).

Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007).

Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006).

H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003).

- Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyat fi islah al Ra'iyat* (dar Al-Kutub al-Arabiyyat, Beirut, 1996).
- Jalaludin Rahmat, *Metodologi Penelitian Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000).
- Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999).
- Mohammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pramedia Group, 2014).
- Mujar Ibnu Syarif & Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Erlangga, 2008).
- Mustofa Hasan Dikutip Dari Imam Tajjuddin Abd Al Wahab Al-Subki, *Al-Asybah Wa Al-Nazha'ir* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1991).
- Ottoe Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003).
- Ridwan HR, *Fiqh Politik; Gagasan Harapan dan Kenyataan* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2010).
- Salim. H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Cet Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Tarsoto: Bandung, 1995).
- Supriyadi Bambang Eko. *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014).

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Bandung: Sinar Baru, 1991).

### C. Artikel Majalah atau Harian

Dani Amran Hakim, “Politik Hukum Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No 23 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 2, (April-Juni 2015).

Heru Kurniawan, “Prinsip Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berbasis Biosentris Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Nuansa* Vol. 14, No. 1 (1 Januari-Juni 2017).

Jumarddin La Fua, “Aktualisasi Pendidikan Islam Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kesalehan Ekologis”, *Jurnal Al-Ta'dib*, Vol. 7 No. 1 (Januari-Juni 2014).

Jupri, “Pengertian Lahan”, *Jurnal Pendidikan Geografi*. On-line tersedia di: <http://file.upi.edu/Direktor/FPIPS/JUR.PEND.GEOGRAFI/196006151988031>, diakses pada 13 Februari 2020, pukul 22.45 WIB.

M.Ramadhan Julianti, ed. al “Perancangan Sistem Informasi Investasi Perkebunan Pada PT. Kampoeng Kurma”, *Jurnal Sisfotek Global*, ISSN: 2088-1762 Vol. 7 No.1 (Maret 2017).

Muhammad bin Ya'qub al-Fayrus Abadi, “Al-Qamus Al-Muhith”, Beirut: Muassasah Ar *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII*, at-Thullab, Vol 1, No 1 (Februari-Agustus 2019), ISSN: 2685-8924. e-ISSN:2685-8681.

Ngadung. I.B, *Ketentuan Umum Pengantar ke Hutan dan Kehutanan di Indonesia* (Ujung Pandang: Pusat Latihan kehutanan,1976).

Yonathan Pengtulan, *Manajemen Sumber Daya alam dan Lingkungan* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015).

### D. Naskah Ilmiah

Delly Yohanna Tumanggor, “Dampak Pemanfaatan Limbah Padat Kelapa Sawit Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di PTPN IV Bah Jambi (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2012).

### E. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 pasal 1 ayat (1) Tentang Pembukaan dan/atau Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 69 ayat 1.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2004 Tentang Perkebunan.

#### **F. Wawancara atau Surat**

Arsip Dokumentasi Profil Desa Datar Kecamatan Muara Dua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

Buku Pembakuan Statistitik Perkebunan, mengacu pada UU No.18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan serta Buku Konsep dan Defenisi Baku Statistik Pertanian Badan Pusat Statistik (2007).

Bpk. Edi Ounisa, Penduduk Desa Datar, wawancara, di rumah responden, tanggal 10 Maret 2020, pukul: 11.12 WIB.

Bpk. Edi Surya Hidayat, Penduduk Desa Datar, wawancara, di Desa Datar, tanggal 10 Maret 2020, pukul: 11.12 WIB.

Bkp. Ediswandi, Sekretaris Desa Datar, wawancara, di Kantor Desa Datar, tanggal 10 Maret 2020, pukul: 11.12 WIB.

Bpk. Madris, Ketua Adat Desa Datar, wawancara, di rumah responden, tanggal 19 Maret 2020, pukul: 08.30 WIB.

Bpk. Mashudi, Penduduk Desa Datar, wawancara, di rumah responden, tanggal 17 Maret 2020, pukul: 11.19 WIB.

Bpk. Syarifuddin Bakri, Kepala Desa Datar, di Kantor Desa Datar, tanggal 10 Maret 2020, pukul: 15.25 WIB.

#### **G. On-Line Informasi Via Internet**

Letak Geografis Desa Datar Kecamatan Muara Dua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, (On-line) tersedia di: Sofwer Peta Koordinat, diakses pada 9 Maret 2020, pukul: 10.25 WIB.

On-line, <http://agroteknologiuisu.blogspot.com/2016/12/landclearingdan.html>, di akses pada 14 Februari 2020, pukul 16:30 WIB.

On-line, <http://agroteknologiuisu.blogspot.com/2016/12/landclearingdan.html>, di akses pada 14 Februari 2020, pukul 16:30 WIB.

On-linetersediadi:<https://www.suduthukum.com/2017/04/ruang-lingkup-siyasah-dusturiyah.html> (14 oktober 2018), diakses pada 11 Maret 2020, pukul: 13.03 WIB.

On-line tersedia di<https://id.wikipedia.org/wiki/Perkebunan>, diakses pada 14 Februari, pukul: 16.45 WIB.

On-line, tersedia di <https://budidayatanaman-perkebunan.blogspot.com>, diakses pada 14 Februuari 2020, pukul 15.00 WIB.

Website Resmi Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, (On-line) tersedia di: <https://okuselatankab.go.id>, diakses pada 9 Maret 2020, pukul: 10. 16 WIB.

